

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG HAK  
TANGGUNGANNYA DILELANG SECARA SEPIHAK OLEH KREDITUR  
(Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Bkt)**

**“Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum”**

**JURNAL**



Oleh

Nama : Yudha Pratama  
NPM : 181000274201232  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT  
BUKITTINGI**

**2025**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG HAK  
TANGGUNGANNYA DILELANG SECARA SEPIHAK OLEH KREDITUR**

**(Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Bkt)**

**“Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum”**

**JURNAL**



Oleh

Nama : Yudha Pratama  
NPM : 181000274201232  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT  
BUKITTINGI  
2025**



## LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG HAK TANGGUNGANNYA DILELANG  
SECARA SEPIHAK OLEH KREDITUR  
(Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Bkt)

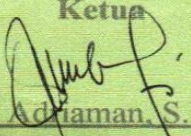
Oleh

Nama : Yudha Pratama  
NIM : 18.10.002.74201.232  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

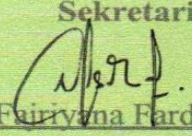
Jurnal ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji *Ujian Komprehensif*  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Pada Tanggal 15  
Februari 2025 dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

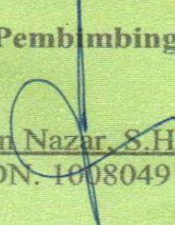
Ketua

  
Mahlil Adhiaman, S.H., M.H  
NIDN. 102101804

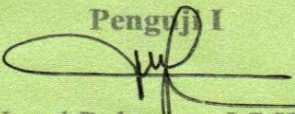
Sekretaris

  
Nessa Fairiyana Farda, S.H., M.H  
NIDN. 1006018801

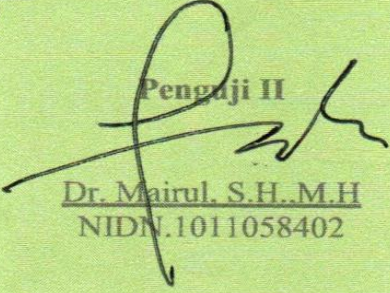
Pembimbing

  
Jasman Nazar, S.H., M.H  
NIDN. 1008049102

Penguji I

  
Dr. Nuzul Rahmlyan, S.H., M.H  
NIDN. 1015058702

Penguji II

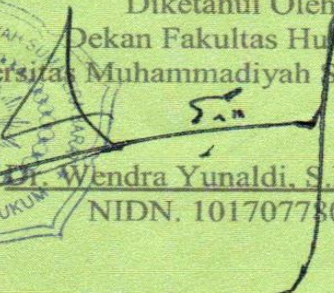
  
Dr. Mairul, S.H., M.H  
NIDN. 1011058402

Diketahui Oleh

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



  
Dr. Wendra Yunaldi, S.H., M.H  
NIDN. 1017077801



**LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG HAK TANGGUNGANNYA DILELANG  
SECARA SEPIHAK OLEH KREDITUR  
(Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Bkt)**

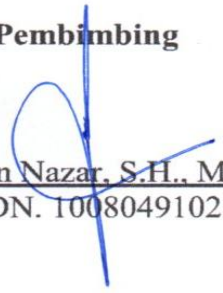
**Oleh**

<b>Nama</b>	<b>: Yudha Pratama</b>
<b>NIM</b>	<b>: 18.10.002.74201.232</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Ilmu Hukum</b>
<b>Program Kekhususan</b>	<b>: Hukum Perdata</b>

Telah disetujui Dosen Pembimbing Di

Bukittinggi, 22 Februari 2025

**Pembimbing**

  
Jasman Nazar, S.H., M.H  
NIDN. 1008049102

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN JURNAL

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Yudha Pratama**  
NIM : **18.10.002.74201.232**  
Judul Jurnal : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG HAK TANGGUNGANNYA DILELANG SECARA SEPIHAK OLEH KREDITUR (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Bkt)**

Menyatakan bahwa Jurnal ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun *plagiasi* (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila Jurnal ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau *plagiasi* (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi, 18 Syaban 1446 H  
17 Februari 2025 M

Yang Menyatakan

  
**Yudha Pratama**

**NIM. 18.10.002.74201.232**



### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG HAK TANGGUNGANNYA DILELANG SECARA SEPIHAK OLEH KREDITUR (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Bkt)

Yudha Pratama<sup>1</sup> & Jasman Nazar<sup>2</sup>

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email : [yudhapratama31199@gmail.com](mailto:yudhapratama31199@gmail.com) & [jasman.ucox.umsb@gmail.com](mailto:jasman.ucox.umsb@gmail.com)

#### Abstract

*The purpose of this research is to find out how auctions are arranged for mortgage rights based on applicable regulations? What is the legal protection for customers whose mortgage rights are auctioned off unilaterally? The method used in this research is normative juridical, using primary, secondary and tertiary data. The nature of this research is descriptive, meaning it describes a phenomenon with straightforward sentences so that it can provide arguments. That PMK Number 27/PMK.06/2016 is an important regulation in regulating the implementation of auctions in Indonesia. This regulation provides a clear legal framework to ensure that auctions are conducted transparently, fairly and in accordance with statutory regulations. In the context of the Bukittinggi Religious Court decision case Number 8/Pdt.G/2019/PA.Bkt, this PMK is a strong legal basis for the Plaintiff to file a lawsuit that the auction carried out by Defendants I and II was against the law because it did not go through an auction request from the Religious Court. That in this case, the Plaintiff filed a lawsuit because the auction for the execution of mortgage rights on his collateral was carried out without going through an auction request from the Religious Court, which violated PMK Number 27/PMK.06/2016. Customers whose mortgage rights are auctioned off unilaterally have strong legal protection based on the UUHT, PMK Number 27/PMK.06/2016, the Civil Code, and the Consumer Protection Law. The process of executing mortgage rights must be carried out through the courts, and customers must be notified and given the opportunity to defend themselves. If an auction is carried out without going through a legal procedure, the customer can file a lawsuit in court to request cancellation of the auction and/or compensation. This legal protection aims to ensure that customer rights are protected and the mortgage rights execution process is carried out fairly and transparently.*

**Keywords:** legal protection, mortgage rights, auction

#### Abstrak

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Pengaturan Lelang Terhadap Hak Tanggungan Berdasarkan Aturan Yang Berlaku ? Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah yang hak tanggungannya di lelang secara sepihak ? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan data primer, sekunder dan tersier. Sifat penelitian ini adalah deskriptif artinya menggambarkan suatu fenomena dengan kalimat lugas sehingga bisa memberikan argumentasi. Bahwa PMK Nomor 27/PMK.06/2016 merupakan peraturan yang penting dalam mengatur pelaksanaan lelang di Indonesia. Peraturan ini memberikan kerangka hukum yang jelas untuk memastikan bahwa lelang dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks kasus putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Bkt, PMK ini menjadi dasar hukum yang kuat bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan bahwa lelang yang dilakukan oleh Tergugat I dan II adalah melawan hukum karena tidak melalui permohonan lelang dari Pengadilan Agama. Bahwa Dalam kasus ini, Penggugat mengajukan gugatan karena lelang eksekusi hak tanggungan atas agunannya dilakukan tanpa melalui permohonan lelang dari Pengadilan Agama, yang melanggar PMK Nomor 27/PMK.06/2016. Nasabah yang hak tanggungannya dilelang secara sepihak memiliki perlindungan hukum yang kuat berdasarkan UUHT, PMK Nomor 27/PMK.06/2016, KUHPerdata, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Proses eksekusi hak tanggungan harus dilakukan melalui pengadilan, dan nasabah harus*

diberitahu serta diberikan kesempatan untuk membela diri. Jika lelang dilakukan tanpa melalui prosedur yang sah, nasabah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta pembatalan lelang dan/atau ganti rugi. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak nasabah dilindungi dan proses eksekusi hak tanggungan dilakukan secara adil dan transparan.

**Kata Kunci:** perlindungan hukum, Hak Tanggungan, lelang

## A. Pendahuluan

Kredit berdasarkan Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah: *"Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan Pihak lain yang mewajibkan Pihak Peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga."* Pemberian kredit oleh Lembaga Keuangan kepada Nasabah akan diikuti dengan hubungan hukum berupa Perjanjian Kredit dan pemberian jaminan oleh Pihak Debitur guna pengamanan kredit. Pada dasarnya tidak ada kredit yang tidak mengandung jaminan, karena sesuai dengan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bahwa: *"Setiap kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan."*<sup>1</sup>

Ruang lingkup kajian hukum jaminan meliputi jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan khusus dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu jaminan perorangan dan kebendaan. Jaminan kebendaan (*materiil*) merupakan jaminan yang berupa hak mutlak (*absolute*) atas sesuatu benda tertentu yang menjadi objek jaminan suatu hutang, yang suatu waktu dapat diuangkan bagi pelunasan hutang Debitur apabila Debitur ingkar janji.<sup>2</sup> Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut (1) Mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari Debitur, (2) Dapat dipertahankan terhadap siapapun, (3) Selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*) dan (4) Dapat dipindahtangankan atau dialihkan

<sup>1</sup> Rachmadi Usman, S. H. *Aspek hukum perbankan syariah di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022, hlm 79.

<sup>2</sup> Djuhaendah Hasan dan Salmidjas Salam. 2000. *Aspek Hukum Hak Jaminan Perorangan dan Kebendaan*. Jakarta, hlm, 210.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

kepada Pihak lain. Sedangkan, jaminan perorangan (imateriil) ialah jaminan yang timbul dari Perjanjian Jaminan antara Bank dengan Pihak Ketiga.<sup>3</sup>

Khusus jaminan benda tidak bergerak yang paling diminati Bank ialah tanah yang dapat dibuktikan kepemilikannya dengan menunjukkan Sertifikat, karena tidak mudah dipindah-tangankan, harganya cenderung meningkat dan mempunyai tanda bukti hak. Lelang terdiri dari 3 (tiga) jenis Lelang yaitu Lelang Eksekusi, Lelang Non eksekusi Wajib dan Lelang Non-eksekusi Sukarela. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (selanjutnya disebut dengan PMK 122 Tahun 2023) menyebutkan bahwa: *"Lelang Eksekusi adalah Lelang untuk melaksanakan Putusan/Penetapan Pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan."*<sup>4</sup> Pelaksanaan Lelang oleh Bank atas objek benda jaminan harus melalui prosedural Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu PMK Nomor 122 Tahun 2023.<sup>5</sup>

Sesuai PMK 122 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang bahwa jenis Lelang dimaksud adalah Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) jo Pasal 20 ayat 1 huruf (a) Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan dapat dilakukan oleh Pemegang Hak Tanggungan pertama untuk melakukan penjualan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum atas aset yang dijadikan sebagai jaminan apabila Debitur cidera janji (wanprestasi).<sup>6</sup> Sedangkan, berdasarkan Pasal 1 angka 1 PMK Nomor 122 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menjelaskan bahwa: *"Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang"*

<sup>3</sup> Budi Dianawati Catur dan Amin Purnawan. 2017. Kajian Hukum Jaminan Hak Tanggungan Yang Dilelang Tanpa Proses Permohonan Lelang Eksekusi Ke Ketua Pengadilan Negeri. Program Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang. Jurnal Akta Vol. 4 No. 2 Juni 2017: 125-132.

<sup>4</sup> Siregar, Nur Rizki, and Mohamad Fajri Mekka Putra. "Tinjauan Hukum Kekuatan Eksekutorial Terhadap Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Atas Debitur Wanprestasi." *Jurnal USM Law Review* 5.1 (2022), hlm 130.

<sup>5</sup> Ningsih, Ayup Suran. "Kajian Yuridis Efektifitas Penyelesaian Kredit Macet Melalui Lelang Hak Tanggungan." *Arena Hukum* 14.3 (2021), hlm 560.

<sup>6</sup> *Ibid.*



*semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman Lelang.”<sup>7</sup>*

Ada beberapa perbedaan mengenai regulasi PMK No. 112 Tahun 2023 yaitu mengatur Penyesuaian tarif pajak. Perluasan atau penyempitan objek pajak, Perubahan mekanisme pelaporan pajak secara elektronik. PMK lama yang menjadi pembanding adalah PMK No. 210/PMK.03/2018, maka perbedaannya bisa dilihat dari Tarif pajak yang diubah, Jenis transaksi yang dikenakan pajak, Ketentuan tentang restitusi pajak. Sehingga terkait dengan penelitian ini, penulis melihat tidak ada pergeseran yang berarti dalam ruang lingkup terkait lelang yang harus diajukan kepada pengadilan agama.

Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Bkt ini merupakan putusan yang mengakhiri perkara ekonomi syariah antara Eli Renjunawita (Penggugat) melawan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi (Tergugat I), Pemerintah RI c/q Menteri Keuangan RI c/q Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c/q Kanwil DJKN Sumatera Barat c/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi (Tergugat II), dan Rinaldi (Tergugat III). Penggugat (Eli Renjunawita) mengajukan gugatan ekonomi syariah terkait pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas agunan miliknya oleh Tergugat I (PT. Bank Syariah Mandiri) melalui Tergugat II (KPKNL Bukittinggi). Penggugat merasa bahwa lelang tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya dan tanpa melalui prosedur yang sah, yaitu tanpa adanya permohonan lelang dari Pengadilan Agama Bukittinggi. Penggugat mengklaim bahwa ia telah berusaha membayar hutangnya dengan menjual mobil dan melakukan pembayaran angsuran, namun Tergugat I tetap melakukan lelang tanpa pemberitahuan yang memadai.

mengajukan beberapa dasar hukum untuk membuktikan bahwa lelang yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah melawan hukum, antara lain PMK Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang menyatakan bahwa permohonan lelang harus diajukan oleh Pengadilan Agama untuk lembaga syariah. Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, khususnya Pasal 26 yang mengharuskan eksekusi hak tanggungan melalui

<sup>7</sup>*Ibid.*

Pengadilan. Dari latar belakang diatas penulis membatasi rumusan masalah menjadi 2 yaitu :

1. Bagaimana Pengaturan Lelang Terhadap Hak Tanggungan Berdasarkan Aturan Yang Berlaku ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah yang hak tanggungannya di lelang secara sepihak ?

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu prosedur untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis.<sup>8</sup> Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu pengumpulan materi atau bahan penelitian yang ditujukan pada dokumen tertulis<sup>9</sup>. Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu memberikan gambaran terhadap fenomena yang sedang terjadi. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan juga tersier, bahan hukum sekunder adalah bahan yang merujuk kepada aturan-aturan yang berlaku, sedangkan bahan sekunder merujuk kepada buku, jurnal, skripsi, tesis dan disertasi yang berkaitan dengan penelitian ini. teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*). Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian adalah bersifat induktif yang artinya menarik kesimpulan dari yang bersifat umum ke sifat yang khusus.

## C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

### 1. Pengaturan Lelang Terhadap Hak Tanggungan Berdasarkan Aturan Yang Berlaku.

Pada dasarnya, sebagaimana dikatakan dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah ( selanjutnya disebut dengan UU Hak Tanggungan), apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak

<sup>8</sup> Husaini Usman dkk, Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008, Edisi Kedua, hlm. 42

<sup>9</sup> Ishaq, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 66.



Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.<sup>10</sup>

Akan tetapi, perlu diingat bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat 1 dan ayat 2 UU Hak Tanggungan, Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan ("APHT"). Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") wajib mengirimkan APHT yang bersangkutan dan warkah lain yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan. Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan (Pasal 14 ayat [1] UU Hak Tanggungan). Sertifikat Hak Tanggungan inilah yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 14 ayat [3] UU Hak Tanggungan). Sedangkan, APHT yang dibuat oleh PPAT adalah langkah pertama dari pemberian hak tanggungan tersebut. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU Hak Tanggungan, pemberian hak tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut. Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan APHT oleh PPAT (Pasal 10 ayat [2] UU Hak Tanggungan).

Pada dasarnya jika APHT tersebut telah didaftarkan di Kantor Pertanahan dan telah memperoleh sertifikat hak tanggungan, maka kreditur dapat melakukan penjualan secara lelang jika debitur wanprestasi. Lebih lanjut, menurut Pasal 34 PMK Nomor 122 Tahun 2023, dalam hal terdapat gugatan terhadap objek lelang hak tanggungan dari pihak lain selain debitur/tereksekusi, suami atau istri debitur/tereksekusi yang terkait kepemilikan, pelaksanaan lelang dilakukan berdasarkan titel eksekutorial dari Sertifikat Hak Tanggungan yang memerlukan fiat eksekusi. PMK Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan

---

<sup>10</sup> Sitompul, Risma Wati, et al. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 4.1 (2022): 95-109.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Lelang merupakan peraturan yang mengatur tata cara dan prosedur pelaksanaan lelang di Indonesia. Peraturan ini penting karena lelang merupakan mekanisme yang sering digunakan dalam berbagai transaksi, termasuk eksekusi hak tanggungan, penjualan aset negara, dan transaksi lainnya yang memerlukan transparansi dan keadilan. *Original Intent* terhadap PMK Nomor 122 tahun 2023.<sup>11</sup> PMK ini bertujuan untuk memberikan petunjuk pelaksanaan lelang yang jelas dan terstruktur, sehingga proses lelang dapat berjalan dengan transparan, adil, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan ini berlaku untuk semua jenis lelang yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) serta lembaga lain yang berwenang melaksanakan lelang. PMK ini mengatur bahwa permohonan lelang harus diajukan oleh pihak yang berwenang, seperti pengadilan (Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama, tergantung pada jenis lembaga yang mengajukan). Hal ini penting untuk memastikan bahwa lelang dilakukan berdasarkan keputusan hukum yang sah. Dalam kasus eksekusi hak tanggungan, permohonan lelang harus diajukan oleh Pengadilan Agama jika lembaga yang mengajukan adalah lembaga syariah (seperti dalam kasus putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Bkt). PMK ini mengatur bahwa lelang harus diumumkan secara terbuka kepada publik untuk memastikan transparansi dan partisipasi masyarakat. Pengumuman ini harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu sebelum pelaksanaan lelang. Lelang harus dilaksanakan oleh pejabat lelang yang berwenang, dan prosesnya harus dilakukan secara terbuka dan kompetitif. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa harga yang diperoleh dari lelang adalah harga yang wajar dan sesuai dengan nilai pasar. Pemohon lelang (biasanya kreditur atau pihak yang memiliki hak eksekusi) wajib mengajukan permohonan lelang sesuai dengan prosedur yang diatur dalam PMK ini. Pemohon juga harus memberikan informasi yang lengkap dan akurat mengenai objek lelang. Peserta lelang memiliki hak untuk

---

<sup>11</sup> Sabila, Putri Reyvita Ridha, et al. "Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Eksekusi Hak Tanggungan Akibat Kredit Macet." *Jurnal Education and Development* 11.1 (2023), hlm 89.



mengikuti lelang secara terbuka dan kompetitif. Mereka juga wajib mematuhi aturan dan prosedur lelang yang telah ditetapkan. Pejabat lelang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa lelang dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam PMK ini. Mereka juga harus menjaga transparansi dan keadilan dalam proses lelang. PMK ini mengatur sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan lelang, seperti melakukan manipulasi atau kecurangan dalam proses lelang. Sanksi ini dapat berupa pembatalan lelang atau tindakan hukum lainnya. PMK ini juga mengatur hal-hal teknis lainnya, seperti tata cara pembayaran, penyerahan objek lelang, dan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dalam proses lelang.<sup>12</sup>

Dalam kasus tersebut, Penggugat (Eli Renjunawita) mengajukan gugatan karena lelang eksekusi hak tanggungan atas agunannya dilakukan tanpa melalui permohonan lelang dari Pengadilan Agama, yang merupakan ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 122 tahun 2023 ini secara tegas menyatakan bahwa permohonan lelang untuk lembaga syariah harus diajukan oleh Pengadilan Agama. Oleh karena itu, lelang yang dilakukan oleh Tergugat I (PT. Bank Syariah Mandiri) melalui Tergugat II (KPKNL Bukittinggi) tanpa permohonan dari Pengadilan Agama dianggap melanggar ketentuan ini. Pelanggaran terhadap PMK ini dapat menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan bahwa lelang tersebut adalah melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sebagaimana diajukan dalam kasus ini.

PMK ini menekankan pentingnya transparansi dalam proses lelang, yang dapat mencegah praktik korupsi dan manipulasi. Dengan mengatur prosedur lelang secara detail, PMK ini memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses lelang. PMK ini juga melindungi hak-hak para pihak, terutama debitur, dengan mewajibkan permohonan lelang melalui pengadilan. Prosedur lelang yang diatur dalam PMK ini bisa dianggap terlalu birokratis dan memakan waktu, terutama dalam kasus-kasus yang memerlukan penyelesaian cepat. Meskipun PMK ini mengatur

---

Gegana, Reza Pramasta, Kalen Sanata, and Sofwan Rizko Ramadoni. "Pelaksanaan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan." *Langgong: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 4.1 (2024), hlm 26.

sanksi bagi pelanggaran, penegakan hukum di lapangan masih seringkali lemah, sehingga pelanggaran terhadap ketentuan ini masih mungkin terjadi.

PMK Nomor 122 Tahun 2023 merupakan peraturan yang penting dalam mengatur pelaksanaan lelang di Indonesia. Peraturan ini memberikan kerangka hukum yang jelas untuk memastikan bahwa lelang dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks kasus putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Bkt, PMK ini menjadi dasar hukum yang kuat bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan bahwa lelang yang dilakukan oleh Tergugat I dan II adalah melawan hukum karena tidak melalui permohonan lelang dari Pengadilan Agama. Namun, efektivitas PMK ini sangat tergantung pada penegakan hukum dan kesadaran para pihak untuk mematuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan ini.

## 2. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Hak Tanggungannya Dilelang Secara Sepihak.

Nasabah yang hak tanggungannya (agunan) dilelang secara sepihak oleh bank atau lembaga keuangan tanpa melalui prosedur yang sah dapat mengalami kerugian materiil dan moril. Oleh karena itu, terdapat beberapa perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah dalam situasi seperti ini.<sup>13</sup> Perlindungan hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses eksekusi hak tanggungan dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>14</sup> Analisis mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah yang hak tanggungannya dilelang secara sepihak Dasar Hukum yang Melindungi Nasabah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) Pasal 6 UUHT Menyatakan bahwa eksekusi hak tanggungan harus dilakukan melalui lembaga yang berwenang, yaitu pengadilan (Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama, tergantung pada jenis lembaga keuangan

<sup>13</sup> Safitri, Shilvia Rahayu, and Jasman Nazar. "Perlindungan Hukum Kepada Pemenang Lelang Atas Objek Eksekusi Hak Tanggungan." *Journal Of Law And Nation* 3.3 (2024), hlm 555.

<sup>14</sup> Liju, Natalia Maria, and A. Budiono. "Perlindungan hukum terhadap pembeli lelang yang tidak menerima objek lelang dalam masa penyerahan." *Jurnal Cakrawala Hukum* 12.3 (2021), hlm 320.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

yang mengajukan eksekusi). Pasal 20 UUHT Menyatakan bahwa eksekusi hak tanggungan harus dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan (fiat eksekusi). Ini berarti bank atau lembaga keuangan tidak dapat melakukan eksekusi secara sepihak tanpa melalui proses pengadilan. Pasal 26 UUHT Menyatakan bahwa eksekusi hak tanggungan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) atau RBG (*Reglement op de Rechtsvordering*), yang mengharuskan adanya campur tangan pengadilan dalam proses eksekusi.

PMK Nomor 122 Tahun 2023 pada Pasal 34 Menyatakan bahwa permohonan lelang untuk lembaga syariah harus diajukan oleh Pengadilan Agama. Ini berarti bank syariah tidak dapat melakukan lelang eksekusi hak tanggungan tanpa melalui permohonan lelang dari Pengadilan Agama. Pasal 15 Mengatur bahwa lelang harus diumumkan secara terbuka kepada publik untuk memastikan transparansi dan partisipasi masyarakat. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 Menyatakan bahwa suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan. Menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 Menyatakan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Pasal 18 Menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha atau mengurangi hak konsumen.<sup>15</sup>

Bank atau lembaga keuangan harus mengajukan permohonan eksekusi hak tanggungan ke pengadilan (Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama) untuk mendapatkan fiat eksekusi. Tanpa fiat eksekusi dari pengadilan, bank tidak dapat melakukan lelang eksekusi. Nasabah

<sup>15</sup> Saputri, Mastura Ajeng, Dewi Kania Sugiharti, and Amelia Cahyadi. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Atas Ketidaksesuaian Objeknya yang Dilakukan Melalui E-Auction." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4.4 (2024), hlm 480.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

harus diberitahu secara resmi mengenai proses eksekusi hak tanggungan, termasuk jadwal lelang dan alasan eksekusi.<sup>16</sup> Pemberitahuan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lelang harus diumumkan secara terbuka kepada publik untuk memastikan transparansi dan partisipasi masyarakat. Pengumuman ini harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu sebelum pelaksanaan lelang. Nasabah yang merasa dirugikan karena hak tanggungannya dilelang secara sepihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.<sup>17</sup> Gugatan ini dapat didasarkan pada pelanggaran terhadap UUHT, PMK Nomor 122 tahun 2023, atau ketentuan lain yang berlaku. Dalam kasus putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Bkt, Penggugat Eli Renjunawita mengajukan gugatan karena lelang eksekusi hak tanggungan atas agunannya dilakukan tanpa melalui permohonan lelang dari Pengadilan Agama. Jika lelang dilakukan tanpa melalui prosedur yang sah, nasabah dapat meminta pembatalan lelang tersebut. Pembatalan ini dapat diajukan melalui gugatan ke pengadilan. Nasabah yang dirugikan karena lelang yang tidak sah dapat meminta ganti rugi kepada bank atau lembaga keuangan yang melakukan lelang secara sepihak. Ganti rugi ini dapat mencakup kerugian materiil dan moril.

Dalam kasus ini, Penggugat mengajukan gugatan karena lelang eksekusi hak tanggungan atas agunannya dilakukan tanpa melalui permohonan lelang dari Pengadilan Agama, yang melanggar PMK Nomor 122 Tahun 2023. Nasabah yang hak tanggungannya dilelang secara sepihak memiliki perlindungan hukum yang kuat berdasarkan UUHT, PMK Nomor 122 Tahun 2023, KUHPdata, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Proses eksekusi hak tanggungan harus dilakukan melalui pengadilan, dan nasabah harus diberitahu serta diberikan kesempatan untuk membela diri. Jika lelang dilakukan tanpa melalui prosedur yang sah, nasabah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta

Ekayani, Lilis, Hardianto Djanggih, and Moh Akli A. Suong. "Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Kejahatan Pencurian Data Pribadi (Phising) Di Lingkungan Perbankan." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 4.1 (2023), hlm 30.

Wisuda, Selvia. "Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna e-Banking: Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perbankan." *MLJ Merdeka Law Journal* 3.1 (2022), hlm 60.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

pembatalan lelang dan/atau ganti rugi. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak nasabah dilindungi dan proses eksekusi hak tanggungan dilakukan secara adil dan transparan.

### D. Kesimpulan

1. Bahwa PMK Nomor 122 tahun 2023 merupakan peraturan yang penting dalam mengatur pelaksanaan lelang di Indonesia. Peraturan ini memberikan kerangka hukum yang jelas untuk memastikan bahwa lelang dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks kasus putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Bkt, PMK ini menjadi dasar hukum yang kuat bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan bahwa lelang yang dilakukan oleh Tergugat I dan II adalah melawan hukum karena tidak melalui permohonan lelang dari Pengadilan Agama.
2. Bahwa Dalam kasus ini, Penggugat mengajukan gugatan karena lelang eksekusi hak tanggungan atas agunannya dilakukan tanpa melalui permohonan lelang dari Pengadilan Agama, yang melanggar PMK Nomor 122 Tahun 2023. Nasabah yang hak tanggungannya dilelang secara sepihak memiliki perlindungan hukum yang kuat berdasarkan UUHT, PMK Nomor 122 Tahun 2023, KUHPerdara, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Proses eksekusi hak tanggungan harus dilakukan melalui pengadilan, dan nasabah harus diberitahu serta diberikan kesempatan untuk membela diri. Jika lelang dilakukan tanpa melalui prosedur yang sah, nasabah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta pembatalan lelang dan/atau ganti rugi. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak nasabah dilindungi dan proses eksekusi hak tanggungan dilakukan secara adil dan transparan.



## DAFTAR PUSTAKA

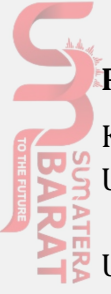
### Buku

- Djuhaendah Hasan dan Salmidjas Salam. 2000. Aspek Hukum Hak Jaminan Perorangan dan Kebendaan. Jakarta.
- Husaini Usman dkk, Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.
- Ishaq, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Rachmadi Usman, S. H. *Aspek hukum perbankan syariah di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.

### Jurnal

- Budi Dianawati Catur dan Amin Purnawan. 2017. Kajian Hukum Jaminan Hak Tanggungan Yang Dilelang Tanpa Proses Permohonan Lelang Eksekusi Ke Ketua Pengadilan Negeri. Program Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang. *Jurnal Akta* Vol. 4 No. 2 Juni 2017.
- Gegana, Reza Pramasta, Kalen Sanata, and Sofwan Rizko Ramadoni. "Pelaksanaan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan." *Langgong: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 4.1 (2024).
- Liju, Natalia Maria, and A. Budiono. "Perlindungan hukum terhadap pembeli lelang yang tidak menerima objek lelang dalam masa penyerahan." *Jurnal Cakrawala Hukum* 12.3 (2021).
- Ningsih, Ayup Suran. "Kajian Yuridis Efektifitas Penyelesaian Kredit Macet Melalui Lelang Hak Tanggungan." *Arena Hukum* 14.3 (2021).
- Sabila, Putri Reyvita Ridha, et al. "Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Eksekusi Hak Tanggungan Akibat Kredit Macet." *Jurnal Education and Development* 11.1 (2023).
- Safitri, Shilvia Rahayu, and Jasman Nazar. "Perlindungan Hukum Kepada Pemenang Lelang Atas Objek Eksekusi Hak Tanggungan." *Journal Of Law And Nation* 3.3 (2024).
- Saputri, Mastura Ajeng, Dewi Kania Sugiharti, and Amelia Cahyadini. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Atas Ketidaksesuaian Objeknya yang Dilakukan Melalui E-Auction." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4.4 (2024).
- Siregar, Nur Rizki, and Mohamad Fajri Mekka Putra. "Tinjauan Hukum Kekuatan Eksekutorial Terhadap Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Atas Debitur Wanprestasi." *Jurnal USM Law Review* 5.1 (2022).
- Sitompul, Risma Wati, et al. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 4.1 (2022).
- Wisuda, Selvia. "Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna e-Banking: Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perbankan." *MLJ Merdeka Law Journal* 3.1 (2022).





## Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.



**SURAT KETERANGAN  
PENERIMAAN JURNAL YUSTISI FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR**

No. 186/YUSTISI-FH/2025

Pengelola Jurnal YUSTISI (Jurnal Hukum dan Hukum Islam) Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor telah menerima dari :

**Nama** : Yudha Pratama, Jasman Nazar

**Email** : [yudhapratama31199@gmail.com](mailto:yudhapratama31199@gmail.com)

**Judul** : Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Hak Tanggungannya  
Dilelang Secara Sepihak Oleh Kreditur (Studi Putusan Nomor  
8/Pdt.G/2019/PA.Bkt)

**Asal Instansi** : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Menyatakan bahwa artikel tersebut akan diproses sesuai prosedur penulisan Jurnal YUSTISI (Jurnal Hukum dan Hukum Islam) Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor Terakreditasi Sinta 5 yang diterbitkan pada bulan Oktober Tahun 2025 dengan Volume. 12 No. 3.

<https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/index>

Demikian surat keterangan ini dibuat dan harap dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Bogor, 24 Februari 2025

YUSTISI FH UIKA







**SURAT KEPUTUSAN**

NOMOR:014/KEP/II.3.AU/F/2023

Tentang

**PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GANJIL T.A. 2023/2024**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;

Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **YUDHA PRATAMA**

**NIM : 181000274201232**

- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);
- b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;
- c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/I.0/B/ 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020
12. SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar .
13. SK Rektor No. 970/II.3.AU/2021 tanggal 20 April 2021 tentang penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM Sumbar TA. 2020.
14. SK Rektor No. 1436/KEP/II.3.AU/F/2021 tanggal, 15 September 2021 tentang Penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum UM Sumbar Tahun 2021.
15. Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun Akademik 2021/2022


**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

- Pertama : Menunjuk Saudara **JASMAN NAZAR,SH.MH** "sebagai Dosen Pembimbing I dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :
- Nama/NIM : **YUDHA PRATAMA / 181000274201232**
- Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN BANK TERHADAP SERTIFIKAT NASABAH YANG HILANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG HAK TANGGUNGAN**
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Bukittinggi  
PADA TANGGAL : 06 Rabiul Akhir 1445 H  
19 Oktober 2023 M

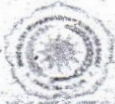
Ketua Prodi,

  
**Mahli Adriaman, SH, MH**  
NIDN. 1021018404

**Tembusan:**

1. Dekan Fakultas Hukum sebagai laporan
2. Kasubag Keuangan Fakultas Hukum
3. Mahasiswa/ Yang bersangkutan
4. Bertanggal





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

# FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jl. By-Pass Aur Kuning - Bukittinggi, Telp./Fax. (0752) 21376

STATUS TERAKREDITASI PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)

Nomor : 2492/SK/BAN-PT/AL-PP/ST/2020, tanggal 05 Mei 2020

## KARTU KENDALI/ BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA

Yudha Pratama

NIM

18.10.002.74201232

KONSENTRASI

Hukum Pidana Hukum Perdata/Hukum Tata Negara

DOSEN PEMBIMBING

1 Jasman Natar, S.H., M.H.

Sebagai Pembimbing I

2

Sebagai Pembimbing II

JUDUL SKRIPSI

Mulai Bimbingan

Sabtu, 20 Okt 2023 s/d

NO	Hari/Tanggal	Jam Bimbingan	Materi Bimbingan	Saran	Paraf Pmbb	Ket
1	Kamis / 2 Nov 2023	12.45 - 13.30	Pembahasan Penulisan Substansi	Lakukan pembahasan		
2	Sabtu / 3 Des 2023	15.00 - 15.45	Pembahasan Substansi	Lakukan pembahasan		
3	Rabu / 20 Des 2023	12.50 - 13.00	Pelomba			
4	Kamis / 21 Des 2023	15.00 - 15.10	Pembahasan Substansi			
5	Sabtu / 23 Des 2023	16.05 - 16.10	Revisi Penulisan			
6	Rabu / 26 Des 2023	17.25 - 17.35	Revisi Penulisan			
7	Jumadi / 2-2-2024	10.30 - 11.00	Bimbingan Draft I	Pembahasan skripsi		
8	Kamis / 10-2-2024	11.45 - 12.00	Bimbingan Draft II	Pembahasan skripsi		
9	Selasa / 11-2-2024	12.00 - 12.10	Bimbingan Draft III			
10	Jumadi, 19-2-2024	11.30 - 11.45	Revisi dan finalisasi	Pembahasan final		
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Catatan: Bimbingan minimal sebanyak 5 kali untuk masing-masing Dosen Pembimbing :

Bukittinggi, 27 Desember 2023

Mahasiswa

Yudha Pratama





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT  
FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jl. By-Pass Aur Kuning - Bukittinggi. Telp./Fax. (0752) 21376

STATUS TERAKREDITASI PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)  
Nomor : 2902/SK.BAN-PT/AK-PP/AN-V/2020, tanggal 05 Mei 2020

JADWAL KEHADIRAN  
SEMINAR PROPOSAL DAN UJIAN SKRIPSI

NO	Hari/ Tanggal	Nama Peserta/ NIM	Judul Skripsi	Paraf Ketua Penyelenggara
1	Rabu 7/8-2019	Xuni Kartika/ 16.10.002.74201 40	Penyelesaian Sengketa Konsumen Jual Beli Online oleh Badan Pertarungan Sengketa Konsumen	
2	Rabu 7/8-2019	Winda Ultras Rahma/15.10.002 74201.172	Perlindungan hukum terhadap kegiatan usaha jasa pemben TV Kabel di rumah untuk Bth 1999	
3	Rabu 7/8-19	Tammy Wary Anggrah/15.10002 4201.118	Peran Lembaga Penjamin Simpanan terkait Kompenasi menerima UU No 7/2019	
4	Rabu 7/8-2019	Rahma Fanti/15. 10.002.74001.010	Kelindungan trade mark elektronik dalam transaksi kegiatan perbankan	
5	Rabu 7/8-19	Ilham Hodi/15-10 002.74001.113	Perlindungan hukum terhadap Narabek Bank dalam Interak Bank melalui metode ml.	
6	Kamis 10/8-2019	Finirita elindra 18.10.002.74001 045	Perlindungan hukum dalam wanprestasi perjanjian jual beli antara distributor dg pdggy nomor 23/pdt. 2018/PN/PTK	
7	Sabtu 24/3-2019	Dinda Laksana 18.10.002.74201 055	Penyelesaian sengketa Harta wanis melalui Perdomaan Gard Kaser Kase 2/Pdt/16/ 2018/PN/PTK	
8	Senin 4/5-2020	Reza Emalia Pena 1810002742018	akibat hukum wanprestasi di koperasi simpan pinjam anggrah Magari Unit Bang	
9	Selasa 14/10-18	Nailati Fadhliah 181000274201065	Kelahiran Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dan tindak pidana penculikan	
10	Kamis 21/11-2019	Yoni Al Fajar 1810002742012 18	Proses pendaftaran tanah oleh pembeli pada jual beli tanah hak persek	

Bukittinggi, 27 Desember 2019

Mahasiswa

*Yuli*  
Tudha Pratama